



**RELASI KUASA AKTOR KEBIJAKAN PENANGAN PENGUNGSI LUAR
NEGERI DI KOTA KUPANG DALAM PERSPEKTIF POST-STRUKTURALIS**

OLEH:

EMANUEL KOSAT

(NIM. 072014353014)

PROGRAM STUDI MAGISTER KEBIJAKAN PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

SEMETER GENAP 2021/2022



TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Magister Kebijakan Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Airlangga

**RELASI KUASA AKTOR KEBIJAKAN PENANGAN PENGUNGSI LUAR
NEGERI DI KOTA KUPANG DALAM PERSPEKTIF POST-STRUKTURALIS**

OLEH:

EMANUEL KOSAT

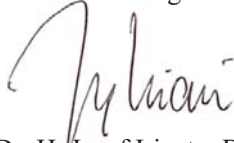
(NIM. 072014353014)

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEBIJAKAN PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
SEMETER GENAP 2021/2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI:
Pada tanggal, Agustus 2022

Pembimbing ketua,



Prof. Dr. H. Jusuf Irianto, Drs., M.com
NIP. 196505061993031003

Pembimbing kedua



Dr. Erna Setijaningrum, S.IP, M.Si
NIP. 197005032000032000

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kebijakan Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga



Dr. Erna Setijaningrum, S.IP, M.Si
NIP. 197005032000032000

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Emanuel Kosat

NIM : 072014353014

Program Studi : Magister Kebijakan Publik

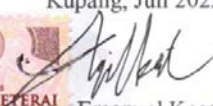
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

“RELASI KUASA AKTOR KEBIJAKAN PENANGAN PENGUNGSI LUAR
NEGERI DI KOTA KUPANG DALAM PERSPEKTIF POST-
STRUKTURALIS”

Bagian dan/atau keseluruhan tesis ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak pernah diajukan untuk mendapat gelar akademis pada bidang studi dan/atau perguruan tinggi lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam tesis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga Surabaya.

Kupang, Juli 2022

METERAI
TEMPEL
A6C5AAJX871444256 Emanuel Kosat
072014353014

PERSEMBAHAN

**TESIS INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK
TUHAN YANG MAHA ESA, KEDUA ORANG TUA/WALI, SAUDARA/I, DAN
SAHABAT-SAHABATKU**

Untuk segala dukungan moril dan materilnya sehingga tesis ini saya persembahkan untuk
setiap pengorbanan yang tak ternilai itu.

MOTO



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kasih, dilatari konsepsi kesatuan pengetahuan dan kesungguhan tekad, peneliti mempersembahkan sebuah karya Tesis. Pencapaian ini tentu menjadi sebuah inspirasi sekaligus motivasi untuk mewujudkan cita-cita peneliti dalam menyelesaikan studi tepat pada waktunya.

Sebuah postulat pernah dilontarkan Foucault bahwasanya “kekuasaan tidak berpusat pada suatu subyek atau lembaga, melainkan tersebar dimana-mana (*omnipresent*) dalam setiap relasi sosial. Kekuasaan tidak berhenti segera setelah diraih, melainkan dijalankan dalam relasi dan terus bergerak.” Dalam karya tesis ini, peneliti berkeinginan menemukan sejauh mana relasi itu berdialektika untuk kemudian mengusulkan kondisi yang dikonstatir oleh Jürgen Habermas sebagai “situasi perbincangan yang ideal”. Melalui karya tesis berjudul: “RELASI KUASA AKTOR KEBIJAKAN PENANGAN PENGUNGSI LUAR NEGERI DI KOTA KUPANG DALAM PERSPEKTIF POST-STRUKTURALIS” ini, merupakan tinjauan yang evaluatif dan aplikatif mengenai fakta dan opini tentang polemik pengungsi serta berisi rujukan pikiran-praktis bagi para aktor kebijakan baik dalam skala internasional, nasional, dan lokal.

Pada saat yang sama ini dengan ketulusan dan kerendahan hati tak lupa peneliti sampaikan limpah terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Jusuf Irianto, Drs., M.Com selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Erna Setijaningrum, S.IP, M.Si selaku Pembimbing II yang dengan sangat

baik menuntun penulisan tesis dan memberikan dukungan baik bagi peneliti.

2. Bapak Dr. Bintoro Wardiyanto, Drs., M.Si, Ibu Sulikah Asmorowati, S.Sos., M.Dev.St, Ph.D, dan Ibu Dr. Retno Andriati, Dra., MA selaku para dewan penguji yang telah banyak memberikan kritik dan saran bagi kesempurnaan penelitian ini.
3. Rektor Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya.
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga Surabaya.
5. Ketua Program Studi Magister Kebijakan Publik FISIP UNAIR.
6. Sekretaris Program Studi Magister Kebijakan Publik FISIP UNAIR.
7. Bapak Dr. Antun Mardiyanta, selaku pembimbing akademik yang telah mengarahkan peneliti mulai dari awal semester hingga semester sekarang.
8. Seluruh staf pengajar pada Magister FISIP UNAIR teristimewa dosen-dosen Magister Kebijakan Publik yang telah membekali peneliti dengan Ilmu dan keterampilan yang bermanfaat selama perkuliahan.
9. Seluruh staf Tata Usaha S2 FISIP UNAIR yang selalu melayani dengan hati dan penuh senyum dalam setiap urusan administrasi. Ibu Reny, Ibu Churil, dkk yang dengan proaktif melayani tanpa pamrih.
10. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT.
11. Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kota Kupang, Kepala Kepolisian Resort Kota Kupang Kota dan staf yang siap sedia memfasilitasi kebutuhan penelitian.
12. Kepala Badan Kesbangpol Kota Kupang Kupang dan staf yang telah

membantu peneliti memberikan data-data yang dibutuhkan.

13. Kepala UNHCR dan IOM Perwakilan Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
14. Para informan yang telah meluangkan waktu dan pikiran selama peneliti melakukan penelitian.
15. Seluruh keluarga besar Kosat, Obenu, Kampur, Manhitu, etc. yang telah banyak membantu peneliti baik moril maupun materil. Dan para ponakan yang lucu dan pintar-pintar, Christian, Fransisco, dan Damian.
16. Sahabat, saudara/i dan rekan-rekan seperjuangan MKP 2020 FISIP UNAIR yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas dinamika, dialog, dialektika dan kebersamaannya. Kalian semua luar biasa dalam perjalanan studi peneliti.
17. Rekan-rekan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) St. Fransiskus Xaverius Cab. Kupang yang memberikan banyak pengalaman berorganisasi sebagai penunjang studi.
18. Keluarga Besar Organisasi Pencak Silat Pendidikan Tunggal Hati Seminari dan Tunggal Hati Maria (THS-THM) Ranting Paroki Kristus Raja Katedral Kupang yang mengajarkan dan memberi dukungan doa dalam karir studi peneliti.
19. Saudara-saudari kader Organisasi Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Kupang yang memberi inspirasi dan kesempatan sebagai pemimpin.
20. Semua pihak yang dengan caranya sendiri telah turut berpartisipasi sehingga

tesis ini dapat terampung dengan baik, terkhusus buat Ibu Veronika Ina Assan Boro, S.IP., M.Si dan Pak Dionesius Agung, S.A.P.

Akhir kata, peneliti sadar bahwa karya tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, segala kritik dan saran yang persuatif nan konstruktif akan diterima dengan senang hati. Semoga karya tesis ini dapat bermanfaat dan berhasil!.

Kupang, Juli 2022

Peneliti

RINGKASAN

Problem pengungsi merupakan isu kemanusiaan yang senantiasa menggugah perhatian internasional termasuk bagaimana usaha Indonesia untuk menoleransi pluralitas pengungsi entah dari sisi etnis, kelas, agama, dan kebangsaan. Eksodus pengungsi dan/atau pencari suaka ada dalam bayang-bayang dilema kehidupan antara menunggu kepastian hijrah ke negara suaka, atau mencoba beradaptasi dengan lokasi transitnya saat ini, maupun memutuskan pulang ke negara asal untuk jemput sanak famili. Jeritan kesengsaraan yang dialami itu lantas menggerakkan ratusan pengungsi di Kota Kupang dalam kurun tahun 2022 secara berturut-turut telah menggelar unjuk rasa di beberapa lokasi berbeda yakni di depan kantor IOM Kupang, Gubernur NTT, Rudenim Kupang, dan Kanwil Kemenkumham NTT. Para pencari suaka itu mempertanyakan kejelasan status mereka yang telah hampir belasan tahun menjalankan hidup tidak menentu dalam keterbatasan pekerjaan, pendidikan, dan perlindungan.

Penanganan polemik pengungsi secara internasional berpedoman pada Konvensi Jenewa 1951 mengenai Status Pengungsi berikut Protokol New York 1967. Kendati Indonesia belum meratifikasi regulasi internasional tersebut tapi Indonesia tetap menjunjung tinggi Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 dengan menerapkan prinsip *non-refoulement* yaitu Indonesia tidak menolak atau mengusir pengungsi ke negara asalnya. Sebagai komitmen Indonesia dalam menjunjung keakraban internasional pada gilirannya telah melahirkan payung hukum bagi

pengungsi berupa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Alhasil koordinasi/korelasi dari aktor internasional, nasional, dan lokal dapat diusahakan untuk merespon isu pengungsi.

Para aktor kebijakan yang menangani pengungsi tentulah digerakan oleh entitas nilai, norma, dan keyakinan ketika memberi arah bagi pengungsi dalam mempersepsikan realitas sosial dan budaya. Karena itu pemikir post-strukturalisme Prancis, Michel Foucault (1926-1984) sejak awal mencurigai bahwasanya dalam hubungan kekuasaan akan menimbulkan saling ketergantungan di antara berbagai pihak, mulai dari pihak yang memegang kekuasaan dan pihak yang menjadi obyek kekuasaan. Hubungan kekuasaan telah menormalisasi melalui proses pembiasaan untuk kemudian memengaruhi sikap dan perilaku obyek, sehingga posisi obyek ketika telah dinormalisasi adalah bersikap takluk, tunduk, dan tidak berdaya. Karenanya implikasi dari gelaran unjuk rasa pengungsi itu dapat dipahami bahwa dibalik koordinasi/korelasi aktor untuk menangani pengungsi terdapat naluri hegemonik yang ikut bermain.

Penelitian ini berangkat dari paradigma post-positivistik sehingga metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Kupang dengan teknik penentuan informannya menggunakan teknik *purposive*. Peneliti secara inisiatif menentukan 15 informan berdasarkan kapasitas keaktorannya dalam memberikan keterangan. Adapun kelima belas informan itu yakni dari aktor lokal (i.e Staf Khusus Gubernur NTT, Kaban Kesbangpol Kota Kupang, dan Kanit Intelkam Polresta Kupang kota), aktor nasional (i.e Kakanwil

Kemenkumham NTT, dan Karudenim Kota Kupang), dan aktor internasional (i.e Divisi IOM Kota Kupang dan Divisi UNHCR Kota Kupang). Teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi secara langsung. Untuk menganalisis penelitian ini dibutuhkan data primer dan sekunder. Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri. Teknik analisis dengan cara pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian membuktikan bahwasanya fakta moratorium penerimaan pengungsi oleh Pemerintah Australia mengakibatkan pengungsi ditampung dalam jangka waktu yang kabur di Indonesia. Khusus Kota Kupang – lokasi perairannya strategis menuju pasifik – menjadi poros maritim pengungsi dari berbagai negara. Oleh sebab itu, dalam penanganan isu pengungsi dengan model rasionalitas komunikatif hendak membimbing setiap pihak untuk saling mengambil-alih perspektif mencapai konsensus nirgesekan. Gagasan ini terkait dengan teoretisi kritis untuk kebijakan publik dari aliran Frankfurt, Jürgen Habermas (1929-sekarang) yang menyarankan norma dan prosedur persetujuan melalui klaim kesahihan (*validity claim*). Rasionalitas komunikatif membimbing seluruh aktor (*e.g.* UNHCR, IOM, Kemenkumham, Rudenim, Pemerintah Daerah, Pengungsi, *etc*) dan setiap stakeholder untuk melakukan refleksi diri, mendialogkan kepentingannya secara setara, dan mencari konteks *mutual understanding* mewujudkan kesetaraan dan kebebasan.

Model rasionalitas komunikatif menyediakan tiga macam sikap performatif. Klaim kesahihan itu meliputi; klaim kebenaran, klaim ketepatan, klaim kejujuran. Pertama, setiap aktor mempunyai peluang yang sama untuk memulai diskusi dan di dalam diskusi itu mempunyai peluang yang sama untuk mengungkapkan argumen-argumen bahkan saling mengkritik. Kedua, di antara aktor tidak ada perbedaan kekuasaan yang memungkinkan argumen relevan sungguh diajukan dan ketiga, semua aktor mengungkapkan pemikirannya dengan ikhlas, sehingga tidak mungkin terjadi yang satu memanipulasi yang lain tanpa disadarinya.

ABSTRAK

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana relasi kekuasaan lintas aktor internasional (i.e. IOM dan UNHCR), nasional (i.e. Kanwil Kemenkumham NTT dan Rudenim Kupang), dan lokal (i.e. Kesbangpol Kota Kupang dan Polresta Kupang Kota) dalam kerangka mengontrol dan mendisiplinkan pencari suaka/pengungsi. Berbagai aktor pada hakikatnya mempunyai ide, nilai dan keyakinan yang berbeda-beda. Dalam Peraturan Presiden No.125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri mensyaratkan ruang relasi para aktor yang juga pada saat yang sama menciptakan koordinasi dan kesenjangan konsepsi. Implikasi relasi para aktor berpretensi ambigu, pesimistis, dan ambivalensi pada pertautan kepentingan, dan antagonisme budaya. Penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif. Data diperoleh dari observasi dan wawancara kepada setiap aktor diantaranya, dari aktor lokal (i.e. Staf Khusus Gubernur NTT, Kepala Badan Kesbangpol Kota Kupang, dan Kepala Unit Intelkam Polresta Kupang Kota), aktor nasional (i.e. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT, dan Kepala Rudenim Kota Kupang), aktor internasional (i.e. Divisi IOM Kota Kupang dan Divisi UNHCR Kota Kupang), pengungsi, dan stakeholder lainnya dengan total informan berjumlah 15 orang. Data dikumpulkan menjadi data primer yaitu keterangan yang diperoleh langsung dari informan, sedangkan data sekunder yaitu dari buku, jurnal, dokumen publik, koran, internet dan data penunjang lainnya. Hasil temuan menunjukkan adanya relasi kekuasaan sebagai strategi para aktor dalam penanganan problem pengungsi melalui impresi tata tertib. Oleh sebab itu, peneliti menyusun prosedur konsensus yang emansipatoris melalui percakapan yang ideal. Adapun *grand* teori yang digunakan sebagai pisau analisis ialah Teori Relasi Kekuasaan yang ditopang pada pencapaian prosedur Rasionalitas Komunikatif dari perspektif Habermas. Luaran yang diharapkan dari penelitian ini ialah memberikan rekomendasi teoretik dan praktikal bagi para aktor dalam penanganan pengungsi.

Kata Kunci: Relasi Kekuasaan, Rasionalitas Komunikatif, Penanganan Problem Pengungsi.

ABSTRACT

This thesis aims to determine the extent of power relations across international actors (i.e. IOM and UNHCR), national (i.e. Kanwil Kemenkumham NTT and Rudenim Kupang), and local (i.e. Kesbangpol Kupang City and Kupang City Police) within the framework of controlling and disciplining asylum seekers/ refugees. Various actors essentially have different ideas, values and beliefs. In Presidential Regulation No. 125 of 2016 concerning Handling Refugees from Overseas, it requires a space for relations between actors which at the same time creates coordination and conceptual gaps. The implications of the relations between actors are ambiguous, pessimistic, and ambivalence on the linkage of interests, and cultural antagonisms. This research was conducted through a qualitative method. Data were obtained through observations and interviews with each actor including, from local actors (i.e. Special Staff to the Governor of NTT, Head of the Kupang City Kesbangpol Agency, and Head of the Kupang City Police Intelligence Unit), national actors (i.e. Head of the NTT Ministry of Law and Human Rights Regional Office, and Head of Kupang City Rudenim), international actors (i.e. IOM Division of Kupang City and UNHCR Division of Kupang City), refugees, and other stakeholders with a total of 15 informants. Data is collected into primary data, namely information obtained directly from informants, while secondary data is from books, journals, public documents, newspapers, internet and other supporting data. The findings show the existence of power relations as a strategy for the actors in handling refugee problems through the impression of order. Therefore, the researcher developed an emancipatory consensus procedure through an ideal speech situation. The grand theory used as an analytical tool is the Power Relation Theory which is supported by the achievement of the Communicative Rationality procedure from the perspective of Habermas. The expected output of this research is to provide theoretical and practical recommendations for actors in handling refugees.

Keywords: *Power Relations, Communicative Rationality, Refugee Problem Handling*

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
RINGKASAN	xi
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR BAGAN	xix
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pertanyaan Penelitian	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	9
1.3.2.2 Manfaat Praktis	9
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN	10
2.1 Tinjauan Pustaka	10
2.2 <i>State of the Art</i>	23
2.3. Tinjauan Teori	24
2.3.1. Relasi Kuasa	25
2.3.1.1 Relasi Kekuasaan Tak Dimiliki Tapi Strategi	27
2.3.1.2 Kerja Relasi Kuasa: Impresi Regulasi dan Tata Tertib	29
2.3.2 Rasionalitas Komunikatif	30
2.4 Definisi Konsep	36
2.5 Kerangka Konseptual	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Metodologi dan Jenis Penelitian	40
3.2 Lokasi Penelitian	45
3.3 Fokus Penelitian	45
3.4 Teknik Penentuan Informan	46
Informan Penelitian	48
3.5 Teknik Pengumpulan Data	48
3.6 Teknik Analisa Data	50

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	52
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	54
4.1 Gambaran Umum Pengungsi di Kota Kupang	54
4.2 Tugas, Tanggung Jawab, dan Struktur Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) NTT	63
Struktur Organisasi Kanwil Kemenkumham NTT	65
4.3 Tugas, Tanggung Jawab, dan Struktur Kantor Rumah Detensi Imigrasi Kota Kupang	72
4.4 Tugas, Tanggung Jawab, dan Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kupang.....	77
4.5 Tugas, Tanggung Jawab, dan Struktur Kepolisian Resort Kota Kupang Kota	82
4.6 Tugas, Tanggung Jawab, dan Struktur <i>United Nations High commissioner for Refugees</i> (UNHCR)	86
4.7 Tugas, Tanggung Jawab, dan Struktur <i>International Organisation for Migration</i> (IOM)	89
BAB V PENYAJIAN DATA, ANALISIS DATA, DAN INTERPRETASI TEORETIK.....	92
5.2.1 Interpretasi Hasil Analisis	138
5.2.2 Intrepretasi Terhadap Penelitian Terdahulu	142
BAB VI PENUTUP.....	150
DAFTAR PUSTAKA	155

DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 Hasil Penelitian Terdahulu	23
Tabel 2 2 Perbedaan Paradigma Kerja dan Komunikatif.....	35
Tabel 3 1 Informan Penelitian	48
Tabel 4 1 Data Pegawai Kesbangpol Kota Kupang Berdasarkan Golongan.....	81
Tabel 4 2 Data Pegawai Kesbangpol Kota Kupang Berdasarkan Pendidikan	82
Tabel 5 1 Perbedaan Kepentingan Inter-aktor	134

DAFTAR BAGAN

Bagan 2 1 Kerangka Konseptual	39
Bagan 4 1 Struktur Organisasi Kanwil Kemenkumham NTT	65
Bagan 4 2 Struktur Organisasi Rudenim Kota Kupang	76
Bagan 4 3 Struktur Organisasi Kesbangpol Kota Kupang	80
Bagan 4 4 Struktur Organisasi Polresta Kupang Kota	85
Bagan 4 5 Struktur Organisasi IOM.....	90
Bagan 5 1 Model Relasi Kuasa Kebijakan Penanganan Pengungsi	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Pengungsi di Kota Kupang Bulan Januari 2022	7
Gambar 1. 2 Jumlah Pengungsi di Kota Kupang Bulan Februari 2022	7
Gambar 4 1 Peta Kota Kupang.....	55
Gambar 4 2 Jumlah Pengungsi di Kota Kupang Bulan Maret 2022.	59
Gambar 4 3 Foto Aktivitas Pengungsi di Community house Hotel Ina Bo'i.	62
Gambar 5 1 Berita aksi nekat dari Pengungsi.	95
Gambar 5 2 Berita aksi nekat dari Pengungsi.	96
Gambar 5 3 Berita Pertengkaran pengungsi versus Pegawai Rudenim.	104
Gambar 5 4 Pengawasan Pengungsi oleh Kepolisian	110
Gambar 5 5 Lembar Laporan Bulanan antara IOM dan Rudenim.....	112
Gambar 5 6 Rudenim Kupang Melakukan Koordinasi dengan IOM dan stakeholder terkait (18 Maret 2021)	114
Gambar 5 7 Berita Resettlement pengungsi	118
Gambar 5 8 Unjuk Rasa Pengungsi di Kantor Gubernur NTT (Foto oleh petugas di lapangan, tanggal 31 Maret 2022, Pukul 11.02 WITA).....	128
Gambar 5 9 Berita Pengungsi Demo di Kantor Gubernur NTT	128
Gambar 5 10 Berita Pengungsi Minta Bantuan Rudenim	129
Gambar 5 11 Berita Pengungsi demo UNHCR	135